



## **PERS RELEASE**

### **Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan dan Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Bojonegoro Tahun 2024**

*Bojonegoro, Kamis, 21 Agustus 2025*

Dalam rangka memperkuat pemahaman publik, khususnya kalangan akademisi, terhadap regulasi pemilu dan dinamika penanganan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan *Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan dan Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024*. Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 21 Agustus 2025 bertempat di Ruang Aktif Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro (Unigoro).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis antara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Acara dihadiri oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, yang peduli terhadap penguatan demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., dalam sambutannya selaku *keynote speaker*, menyampaikan pentingnya keterlibatan akademisi dalam proses pengawasan pemilu, tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

"Kami dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada Civitas

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro telah diberi kesempatan melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024. Karena Fakultas Hukum Unigoro merupakan pionir dan satu-satunya Universitas di Bojonegoro yang memiliki Fakultas Hukum. Kita membahas tentang Pemilu 2024 yang telah kita lalui, Fakultas Hukum menjadi tempat yang cocok untuk kita ajak diskusi bersama. Masa depan demokrasi akan menjadi tanggungjawab kita semua.” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Didiek Wahju Indarta, S.H., Sp.1., yang juga bertindak sebagai *keynote speaker*, menegaskan bahwa sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan tinggi merupakan langkah konkret dalam menciptakan proses pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. “Kami menyambut baik kerjasama ini sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung pendidikan politik dan penguatan literasi hukum di kalangan mahasiswa fakultas hukum. Bawaslu selalu penegak demokrasi tentunya tugasnya sangat berat sekali, apapun permasalahan yang nanti akan dibahas mohon agar diperhatikan,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, para narasumber yang terdiri dari Anggota Bawaslu Bojonegoro dan Dosen Fakultas Hukum Unigoro memaparkan berbagai dinamika yang terjadi selama proses pemilu, mulai dari bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan, mekanisme penanganannya, hingga refleksi terhadap peran pengawasan partisipatif masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang transfer pengetahuan, tetapi juga forum dialog yang mempertemukan perspektif praktisi dan akademisi dalam memperkaya wacana penegakan hukum pemilu. Diseminasi ini diharapkan mampu menjadi medium strategis untuk membangun budaya politik yang sehat serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Bojonegoro.

Narahubung: 085704212012